



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat kami selesaikan walaupun dalam bentuk dan isi yang masih jauh dari harapan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Daerah dari yang lainnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) masih jauh dari yang diharapkan, untuk itu kami mengharapkan masukan, saran, pendapat yang sifatnya produktif untuk perbaikan selanjutnya yang lebih baik.

Atas partisipasi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala-kepala Sub Bidang serta seluruh staf Lingkup Badan Pendapatan Daerah dalam penyusunan dan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami mengucapkan terima kasih.

Bengkalis, Januari 2021



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

SURARDI S.Sos. MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710808 199703 1 006

DAFTAR - ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. TUGAS DAN FUNGSI	2
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	7
BAB II PERJANJIAN KERJA	8
A. RENCANA STRATEGIK	8
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. PENGUKURAN KINERJA	10
B. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA.....	10
C. REALISASI ANGGARAN.....	14
D. ANALISIS EFISIENSI.....	16
BAB IV PENUTUP.....	18
A. KESIMPULAN.....	18
B. SARAN-SARAN.....	19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2020, adapun tujuannya adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja pemerintah pada setiap tahunnya.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Eselonering, Tugas Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

KEPALA

1. Kepala mempunyai tugas Membantu Bupati, Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah
2. Kepala dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah
 - c. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pendapatan Daerah
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pendapatan Daerah
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Pendapatan Daerah
 - f. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
 - g. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian.
2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian rumah tangga Badan Pendapatan Daerah
 - c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset
 - d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat
 - e. Pelaksanaan urusan Hukum, organisasi dan hubungan masyarakat
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
3. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program.
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan kegiatan dan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Sub Bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

1. Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang Pendataan dan Pendaftaran.

2. Susunan Organisasi Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendaftaran.

Sub Bidang Pendaftaran mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pendaftaran.

b. Sub Bidang Penilaian.

Sub Bidang Penilaian mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang Penilaian.

c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang Pengolahan Data dan Informasi.

BIDANG PENERIMAAN DAN PEMBUKUAN

1. Bidang Penerimaan dan Pembukuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penerimaan dan pembukuan.

2. Susunan Organisasi Bidang Penerimaan dan Pembukuan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Dana Bagi Hasil.

Sub Bidang Dana Bagi Hasil mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang dana bagi hasil.

b. Sub Bidang Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB.

Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang PBB-P2 dan BPHTB.

c. Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah.

BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN

1. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penagihan dan keberatan.

2. Susunan Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Penagihan.

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang penagihan.

b. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan.

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang keberatan dan pengurangan

c. Sub Bidang Pemeriksaan.

Sub Bagian Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pemeriksaan.

BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang pengendalian dan pengembangan.

2. Susunan Organisasi Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Analisa dan Pendapatan.

Sub Bidang Analisa dan Pendapatan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang analisa dan pendapatan.

b. Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan.

Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pengembangan dan perundang-undangan.

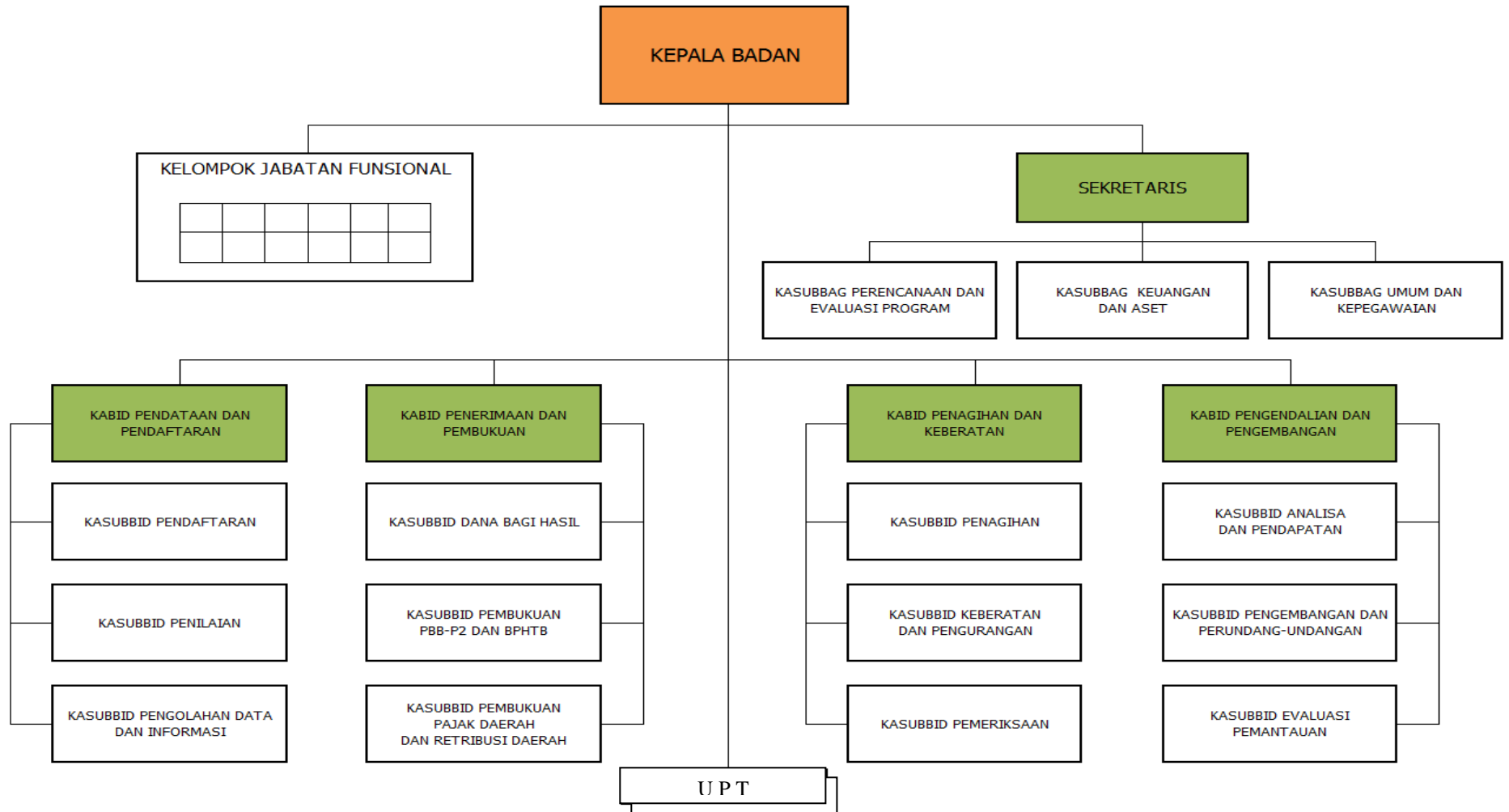
c. Sub Bagian Bidang Evaluasi Pemantauan

Sub Bidang Evaluasi Pemantauan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang evaluasi dan pemantauan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
2. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu atau sebagai perpanjangan Badan di Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Bengkalis. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. UPT PBB-P2 Sektor Perkotaan dan Perdesaan
 - b. UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis
 - c. UPT Pendapatan Kecamatan Bantan
 - d. UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu
 - e. UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil
 - f. UPT Pendapatan Kecamatan Mandau yang mengkoordinir Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan
 - g. UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir yang mengkoordinir Kecamatan Pinggir dan Tualang Muandau
 - h. UPT Pendapatan Kecamatan Rupert
 - i. UPT Pendapatan Kecamatan Rupert Utara

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan melaporkan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

A. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016 -2021

Tabel 2.1.
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85%	90%	95%	95%
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan	Meningkatnya Penerimaan Daerah	• Persentase Peningkatan Pajak Daerah	20%	40%	60%	80%	100%
		• Rasio PAD Terhadap APBD	7%	7%	8%	9%	10%
Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja	• Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	B
		• Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%
2	Meningkatkan Penerimaan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	80%
		Rasio PAD Terhadap APBD	9%
3	Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Keuangan	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	91%	91%
Meningkatkan Penerimaan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	80%	74%	74%
		86.133.015.776,90	63.710.380.457,25	
	Ratio PAD Terhadap APBD	9%	86,74%	77%
		368.339.141.269,94	266.160.192.237,96	
Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	CC	75%
	Persentase Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Keuangan	100%	100%	100%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan dapat dinilai dari segi Indeks Kepuasan Masyarakat yang bersumber dari pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bengkalis. Salah satu tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dalam administrasi dan pembayaran Pajak Daerah ikut berkontribusi untuk terus meningkatkan pelayanan yang dapat dilihat capainnya sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah

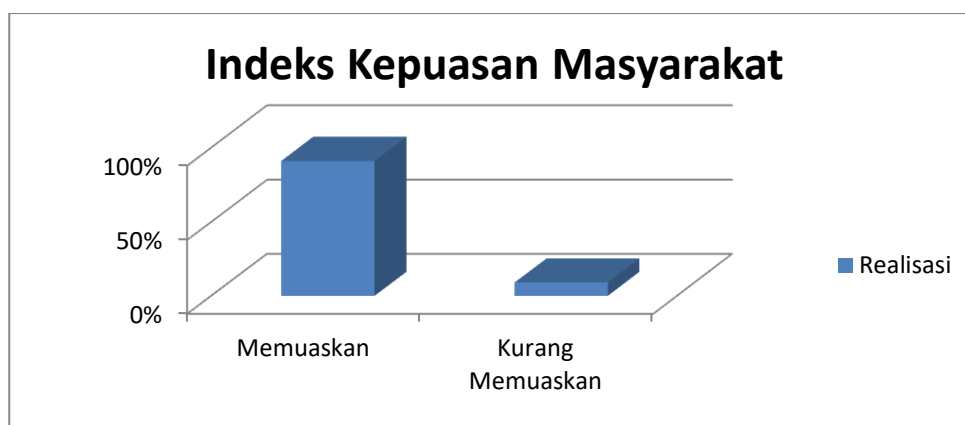
Indikator	2016	2020			Capaian 2020 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat	-	90%	91%	91%	95%

Di dalam penilaian indeks kepuasan masyarakat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis melakukan dengan cara menyiapkan koin sebagai indikator untuk menentukan nilai kepuasan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Koin tersebut akan dimasukkan kedalam salah satu dari dua kotak yang telah disiapkan dengan masing-masing penilaian memuaskan dan kurang memuaskan. Dari koin-koin yang terkumpul dalam masing-masing kotak tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah

No	Nilai	WP Yang Memberikan Penilaian	Persentase
1	Memuaskan	1.056	91%
2	Kurang Memuaskan	102	9%
Jumlah		1158	100%

Grafik 3.1.
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah



Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan, jumlah sampel yang dikumpulkan dalam satu tahun terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berjumlah 1.158 responden.

Sebanyak 1.056 responden atau 91% memberikan penilaian Memuaskan dan 102 responden atau 9% memberikan penilaian kurang memuaskan.

2. Indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah

Untuk melihat persentase Peningkatan Pajak Daerah, maka indikator ini mengambil data dari realisasi yang diterima pada tahun 2020, maka dengan itu indikator ini dapat di lihat keberhasilannya pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Indikator Capaian Kinerja Peningkatan Pajak Daerah

Indikator	2016	2020			Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Peningkatan Pajak Daerah	47.851.675.431,61	80%	74%	74%	63,21%
		86.133.015.776,90	63.710.380.457,25		

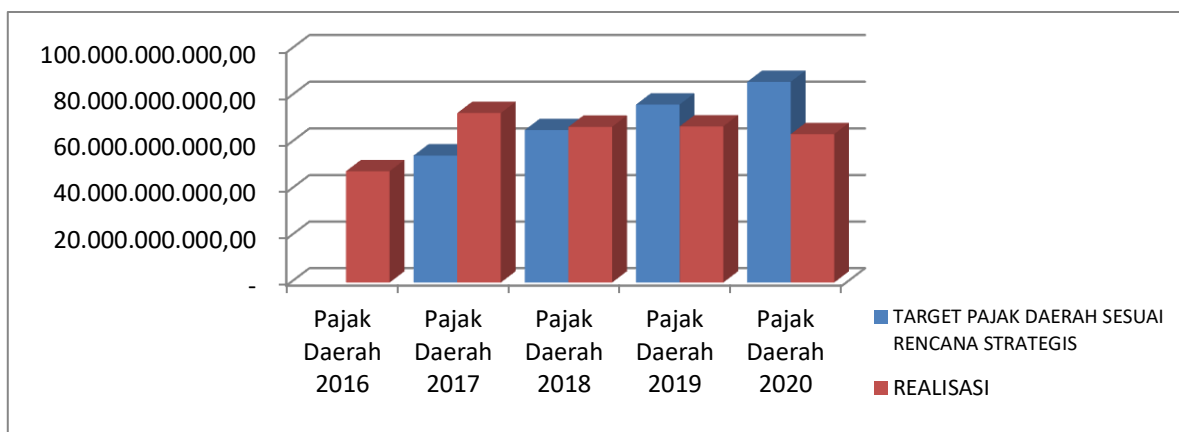
Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pada Tahun 2020 peningkatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar 80% atau Rp. 86.133.015.776,90 dari awal penetapan pada tahun 2016 yakni Rp. 47.851.675.431,61. Artinya pada tahun 2020 peningkatan target Pajak daerah mengalami kenaikan 38.281.340.345. Dari target Pajak Daerah yang ditetapkan untuk tahun 2020, maka realisasinya sebesar 74% atau 63.710.380.457,25. Adapun untuk melihat jumlah peningkatan dan target pajak daerah dapat di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Target rencana strategis dan realisasi Pajak Daerah

NO	TAHUN	TARGET PARENSTRA			REALISASI KINERJA TAHUNAN	
		KENAIKAN (%)	NOMINAL KENAIKAN	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	TAHUN 2016	-	-		47.851.675.431,61	
2	TAHUN 2017	20%	9.570.335.086	57.422.010.517,93	72.762.987.897,74	127%
3	TAHUN 2018	40%	19.140.670.173	66.992.345.604,25	66.854.523.376,25	99,79%
4	TAHUN 2019	60%	28.711.005.259	76.562.680.690,58	67.046.859.434,39	88%
5	TAHUN 2020	80%	38.281.340.345	86.133.015.776,90	63.710.380.457,25	74%

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk Tahun 2020, Realisasi yang dicapai jika mengacu pada Target yang tertera pada Renstra belum mencapai target maksimal, pencapaian Pajak Daerah jika dipersentasekan sebesar 74 persen.

Grafik 3.2.
Target dan realisasi Pajak Daerah



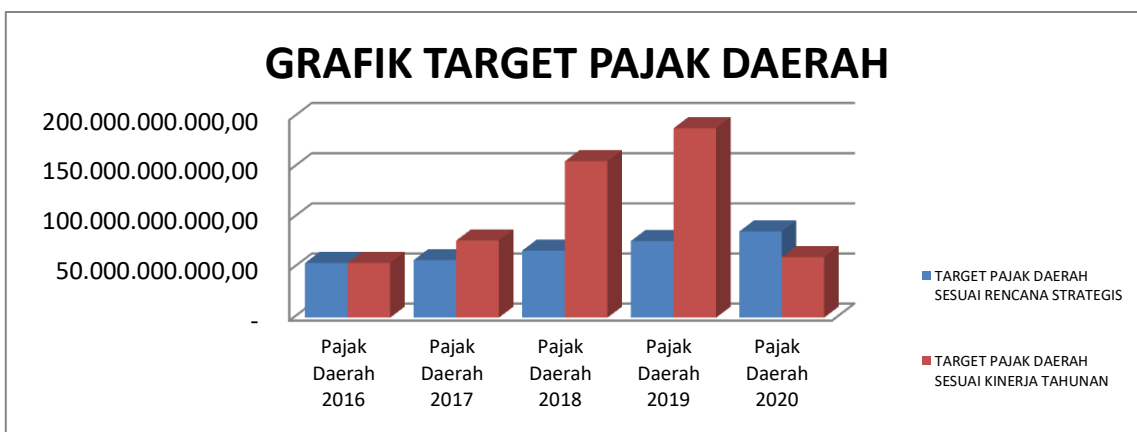
Selain hal tersebut di atas, jika dibandingkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan target Pajak Daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Target dalam Rencana Strategis Dan Target Pajak setiap tahun

No	Penerimaan Pajak Daerah	Rencana Strategis			Target Pajak Daerah		
		Presentase Kenaikan Target dari 2016	Nominal Kenaikan	Target	Presentase Kenaikan/ Penurunan Target dari 2016	Nominal Kenaikan	Target
1	Pajak Daerah 2016			47.851.675.431,61			54.580.000.000,00
2	Pajak Daerah 2017	20%	9.570.335.086,00	57.422.010.517,93	41,08 %	22.420.000.000,00	77.000.000.000,00
3	Pajak Daerah 2018	40%	19.140.670.173,00	66.992.345.604,25	102,59 %	78.995.000.000,00	155.995.000.000,00
4	Pajak Daerah 2019	60%	28.711.005.259,00	76.562.680.690,58	21,03 %	32.805.000.000,00	188.800.000.000,00
5	Pajak Daerah 2020	80%	38.281.340.345,00	86.133.015.776,90	-67,96 %	-128.300.000.000,00	60.500.000.000,00
6	Pajak Daerah 2021	100%	47.851.675.432,00	95.703.350.863,22	-	-	-

Dari tabel di atas dapat diartikan bahwa penetapan Target Pajak Daerah antara yang ditetapkan pada Renstra dan target Pajak Daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya sedikit berbeda, hal ini dikarenakan perhitungan Potensi Pajak Daerah dan banyak faktor yang menjadi pertimbangan pada setiap tahunnya, misalnya faktor pertumbuhan Ekonomi, Faktor Alam dan Kesehatan lainnya. Terlihat pada tabel pada Tahun 2019 target Pajak Daerah sebesar Rp.188.800.000,00, Tahun 2020 turun sebesar Rp. 128.300.000.000,00 menjadi Rp. 60.500.000.000,00. Hal ini dikarenakan adanya pandemi wabah Covid 19 yang melanda seluruh dunia, sehingga berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia termasuk juga di Kabupaten Bengkalis.

Grafik 3.2.
Perbandingan Target Rencana Strategis dan Target Kinerja Tahunan

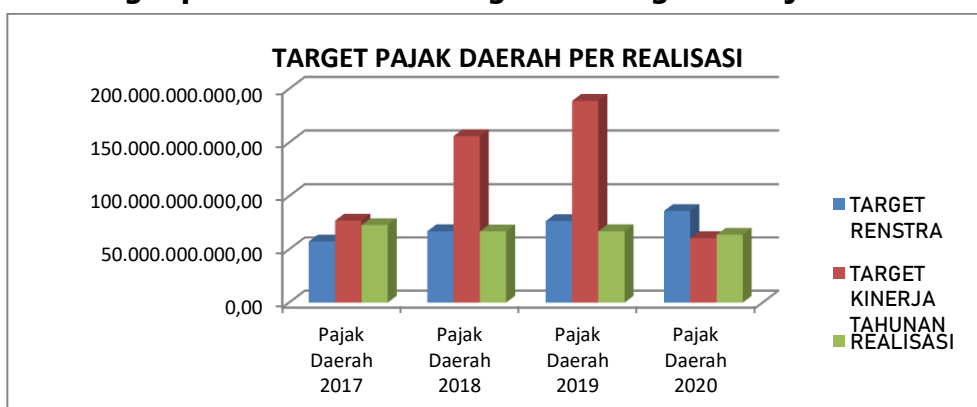


Sebagai perbandingan target antara yang ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Target yang ditetapkan pada setiap Tahunnya dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7.
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan Target Pada Rencana Strategis dan Target Kinerja Tahunan

NO.	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	TARGET DI RENCANA STRATEGIS	TARGET KINERJA TAHUNAN	REALISASI (Rp)
1	Pajak Daerah 2017	57.422.010.517,93	77.000.000.000,00	72.762.987.897,74
2	Pajak Daerah 2018	66.992.345.604,25	155.995.000.000,00	66.854.523.376,25
3	Pajak Daerah 2019	76.562.680.690,58	188.800.000.000,00	67.046.859.434,39
4	Pajak Daerah 2020	86.133.015.776,90	60.500.000.000,00	63.710.380.457,25

Grafik 3.3.
Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan Target pada Rencana Strategis dan Target Kinerja Tahunan

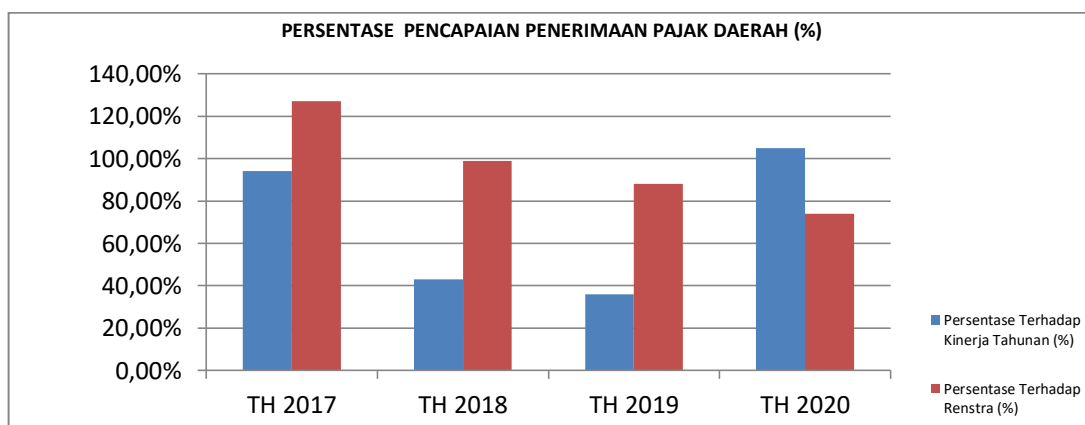


Realisasi Pajak Daerah ditahun 2020 jika dibandingkan dengan target Renstra yang telah ditetapkan realisasinya mencapai 74%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Pajak Daerah yang ditetapkan pada Tahun 2020, Realisasi mencapai 105%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8.
Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan
Target Rencana Strategis dan Realisasi dihitung dalam persentase

No	Tahun	Target Pada Rencana Strategis			Target dan Realisasi Tahunan Pajak Daerah		
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1	2017	57.422.010.517,93	72.762.987.897,74	127%	77.000.000.000,00	72.762.987.897,74	94%
2	2018	66.992.345.604,25	66.854.523.376,25	99%	155.995.000.000,00	66.854.523.376,25	43%
3	2019	76.562.680.690,58	67.046.859.434,39	88%	188.800.000.000,00	67.046.859.434,39	36%
4	2020	86.133.015.776,90	63.710.380.457,25	74 %	60.500.000.000,00	63.710.380.457,25	105 %

Grafik 3.4.
Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan
Persentase Target Rencana Strategis dan Persentase Target Kinerja



3. Indikator Rasio PAD terhadap APBD

Komponen dari Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mengukur seberapa besar Penerimaan yang berasal dari PAD berkontribusi terhadap APBD Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya, sebagai perhitungan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9.
Indikator Capaian Kinerja
Rasio PAD Terhadap APBD

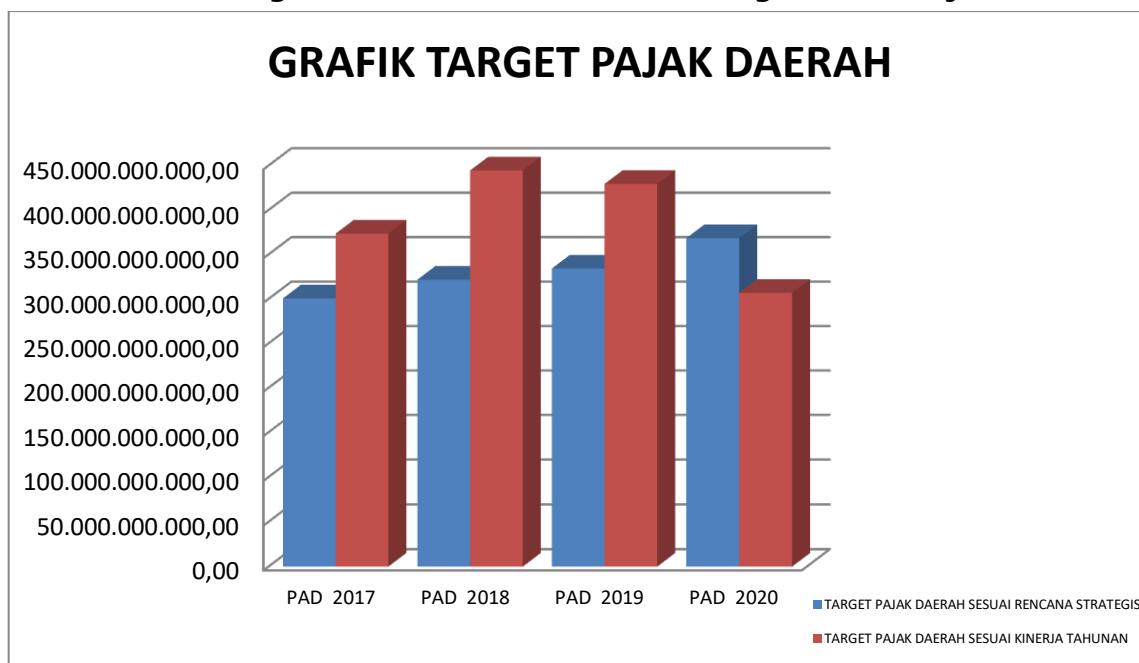
Indikator	2016	2020			Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Rasio PAD terhadap APBD	151.153.940.623,69	9 %	72,25 %	72,25 %	67,53 %
		368.339.141.269,94	266.160.192.237,96		

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pada Tahun 2020 peningkatan Rasio PAD terhadap APBD ditargetkan sebesar 9 % atau Rp. 368.339.141.269,94 dari awal penetapan pada tahun 2016 yakni Rp. 47.851.675.431,61. Artinya pada tahun 2020 peningkatan target Pajak daerah mengalami kenaikan 38.281.340.345. Dari target Pajak Daerah yang ditetapkan untuk tahun 2020, maka realisasinya sebesar 74% atau 63.710.380.457,25. Adapun untuk melihat jumlah peningkatan dan target pajak daerah dapat di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10.
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan

No	Rasio PAD terhadap APBD	Rencana Strategis			Target dan Realisasi Tahunan		
		Presentase Kenaikan Target dari 2016	Nominal Kenaikan	Target	Kenaikan/penurunan Target dari 2016	Nominal Kenaikan/penurunan	Target
1	2016			281.004.167.284,53			281.004.167.284,53
2	2017	7%	21.047.212.129,61	300.674.458.994,45	32,93 %	92.536.224.715,47	373.540.392.000,00
3	2018	7%	22.520.516.978,68	321.721.671.124,06	19,00 %	70.970.058.102,00	444.510.450.102,00
4	2019	8%	24.096.953.167,19	344.242.188.102,74	-3,41 %	-15.139.776.975,00	429.370.673.127,00
5	2020	9%	25.783.739.888,90	368.339.141.269,94	-28,54 %	-122.528.282.978,70	306.842.390.148,23
6	2021	10%	27.588.601.681,12	394.122.881.158,83	-	-	-

Grafik 3.5.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan

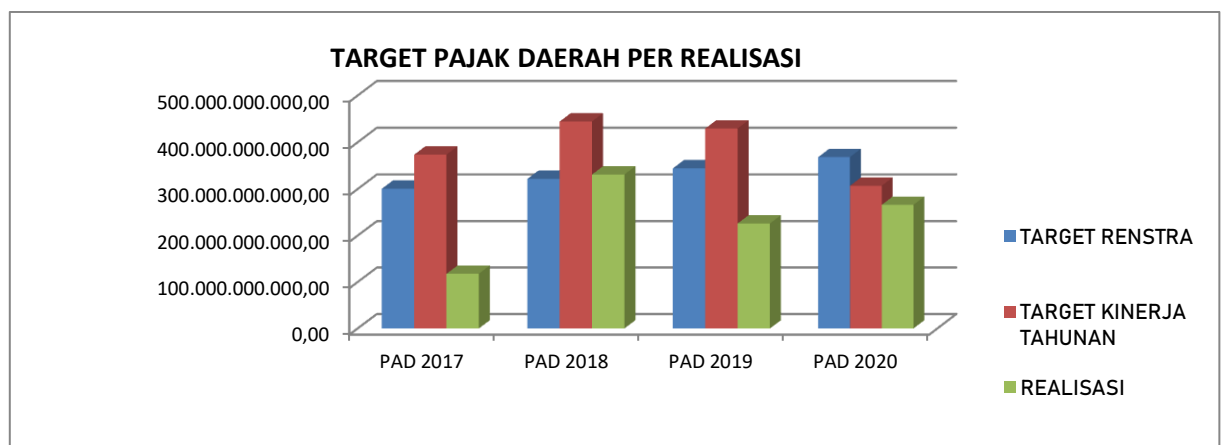


Berdasarkan gambaran grafik di atas dapat dilihat bahwa rata rata setiap tahunnya target PAD lebih tinggi dibandingkan target PAD yang ditetapkan pada Renstra Bapenda kecuali pada tahun 2020.

Tabel 3.11.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan

NO.	Tahun	TARGET RENCANA STRATEGIS	TARGET KINERJA TAHUNAN	REALISASI (Rp)
1	2017	300.674.458.994,45	373.540.392.000,00	117.834.343.573,53
2	2018	321.721.671.124,06	444.510.450.102,00	331.096.384.302,38
3	2019	344.242.188.102,74	429.370.673.127,00	226.062.237.942,22
4	2020	368.339.141.269,94	306.842.390.148,23	266.160.192.237,96

Grafik 3.6.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan

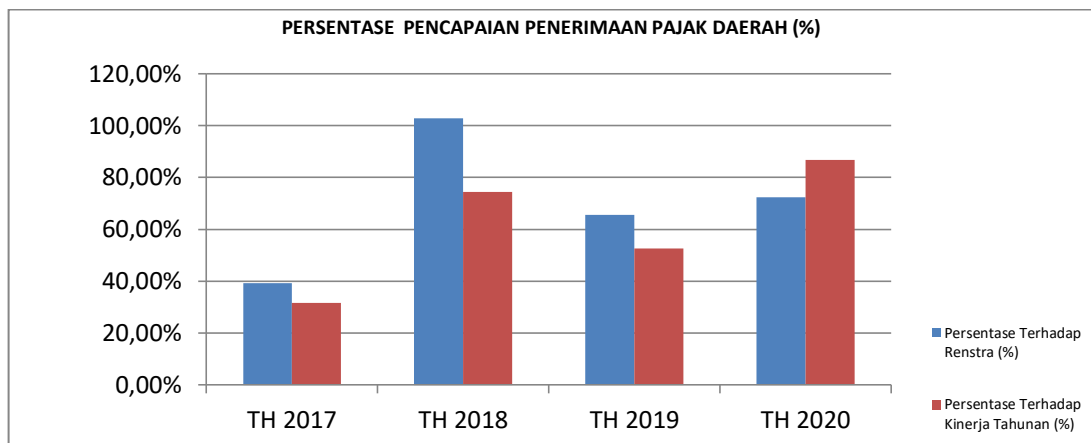


Dari grafik diatas dapat dilihat target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya, namun belum dapat mencapai target secara maksimal.

Tabel 3.12.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan
Dihitung Dalam Persentase

No	Tahun	Rencana Strategis			Target dan Realisasi Tahunan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2017	300.674.458.994,45	117.834.343.573,53	39,19%	373.540.392.000,00	117.834.343.573,53	31,55%
2	2018	321.721.671.124,06	331.096.384.302,38	102,91%	444.510.450.102,00	331.096.384.302,38	74,49%
3	2019	344.242.188.102,74	226.062.237.942,22	65,67%	429.370.673.127,00	226.062.237.942,22	52,65%
4	2020	368.339.141.269,94	266.160.192.237,96	72,26%	306.842.390.148,23	266.160.192.237,96	86,74%

Grafik 3.7.
Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan



Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwasanya untuk realisasi penerimaan Daerah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- ✓ Intensifikasi Perubahan Tarif pajak melalui Revisi Peraturan-peraturan yang berlaku.
- ✓ Ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan mendata jumlah wajib pajak baru yang melalui sosialisasi/penyuluhan.
- ✓ Kondisi sosial masyarakat yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah melalui sektor pajak dan retribusi.
- ✓ Sistem Pembayaran yang dilakukan dengan kerjasama perbankan sehingga Masyarakat memudahkan untuk melakukan pembayaran.
- ✓ Koordinasi dan Komitmen Stackholder antar instansi yang cukup baik.
- ✓ Sosialisasi dan penyuluhan baik terhadap Wajib Pajak, maupun kepada aparat yang mengelola bidang PAD.
- ✓ Melakukan respon dengan cepat terhadap pelayanan dan permasalahan yang di hadapi.

D. Permasalahan/Hambatan

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan ataupun hambatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis masih memerlukan adanya perbaikan pada berbagai bidang untuk dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah

dicapai. Adanya beberapa kendala/hambatan yang perlu diantisipasi sejak dini, antara lain sebagai berikut:

- ✓ Kurang kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi potensi yang ada.
- ✓ Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak masih rendah.
- ✓ Sumber daya manusia yang sangat terbatas dan memiliki pendidikan yang kurang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan.
- ✓ Memberikan Prioritas Pengawasan terhadap kegiatan, program dan kebijaksanaan yang mempunyai bobot atau pengaruh besar terhadap pencapaian kinerja secara keseluruhan dengan tidak mengabaikan kegiatan, program dan kebijaksanaan lainnya serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang keberhasilan kinerja. Termasuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem administrasi yang terkait dengan pengumpulan data hasil kinerja.
- ✓ Perlu koordinasi dan komunikasi yang intens kepada Badan atau Dinas terkait untuk membentuk strategi dalam menegakkan aturan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

E. Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Menyikapi hal tersebut, dalam usaha untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun mendatang, perlu upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Upaya strategis pemecahan masalah tersebut antara lain adalah:

- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- ✓ Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang disusun dapat mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan.
- ✓ Peningkatan kualitas dan keakuratan data yang dikumpulkan.
- ✓ Melakukan koordinasi external kepada Dinas atau Badan yang kuat baik itu didalam melakukan pelaksanaan di lapangan, maupun secara administrasi yang terkait dengan penerimaan daerah baik itu didalam meliputi atas pemberian izin atau rekomendasi lainnya.
- ✓ Meningkatkan efisiensi, efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

- ✓ Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan atau short course dan sosialisasi sistem yang baru.
- ✓ Meningkatkan sumberdaya manusia khususnya di bidang perpajakan baik dari segi pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi terhadap wajib pajak yang berdasarkan dengan aturan yang berlaku.
- ✓ Lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

F. Realisasi Anggaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun anggaran 2020 telah menganggarkan dana sebesar Rp 25.134.181.288,00 (Dua puluh lima milyar seratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 13.299.647.588,00 (Tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.834.533.700,00 (Sebelas milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung yang terdiri dari 6 (enam) program dan 47 (Empat puluh tujuh) kegiatan.

Anggaran Belanja tidak Langsung sebesar Rp 13.299.647.588,00, realisasinya pada tahun anggaran tahun 2020 sejumlah Rp 12.736.554.045,00 atau mencapai 95,77 %. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp11.126.233.700,00 realisasinya tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 10.441.420.980,00 atau 87,97%. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Realisasi Anggaran terhadap Indikator Kinerja

NO	URAIAN	IDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	
					Rp.	%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah						
1	Pelayanan Pajak Daerah	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	1 Tahun	331.255.000,00	295.613.000,00	89,24 %
2	Penerapan Pajak Secara Online	Terlaksananya Penerapan Penerimaan Pajak Daerah Secara Online	1 Tahun	449.814.000,00	371.195.800,00	85,52 %

Sasaran : Peningkatan Penerimaan Daerah						
3	Koordinasi Penerimaan Daerah	Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan dalam 1 Tahun	1 tahun	529.314.000,00	527.531.000,00	99,66 %
4	Penagihan dan Verifikasi PAD	Terlaksanannya Penagihan dan Verifikasi Terhadap Tunggakan PAD	1 tahun	642.417.000,00	450.315.000,00	70,10%
5	Pendataan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan	Peningkatan Kualitas Data	1 tahun	373.350.000,00	241.180.000,00	64,60%
6	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya pemutakhiran dan data	1 tahun	152.340.000,00	120.320.000,00	78,98%
7	Observasi dan Verifikasi data objek Pajak BPHTB	Terjaringnya wajib pajak BPHTB	1 tahun	77.250.000,00	31.390.000,00	40,63%
8	Gerakan Taat Pajak	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah	1 Tahun	502.250.000,00	397.260.000,00	79,10%
9	Pemeriksaan Pajak Daerah	Mendapatkan Data Transaksi Wajib Pajak Selama Pemeriksaan	1 tahun	190.655.000,00	151.510.000,00	79,47%
10	Rekonsiliasi Dana bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	Terlaksanannya Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	1 tahun	426.091.000,00	393.066.068,00	92,25%
11	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tersedianya Perda dan Perbup dalam pemungutan PAD	1 tahun	83.834.000,00	44.098.783,00	52,60%
12	Penilaian Individual PBB	Peningkatan Kualitas Data yang Akurat	1 tahun	106.600.000,00	71.330.000,00	66,91%
13	Evaluasi Data BPHTB	Terlaksanannya Sinkronisasi Data	1 tahun	51.400.000,00	26.110.000,00	50,80%
14	Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah	Pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi pajak daerah	1 tahun	143.280.000,00	114.583.000,00	79,97%

15	Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah	Evaluasi dan Keadaan Fisik Lapangan	1 tahun	34.000.000,00	19.160.000,00	56,35%
16	Penyampaian SPPT PBB P2 se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Penyampaian SPPT PBB yang terdistribusi	1 tahun	667.290.000,00	434,425,500,00	65,10%
Sasaran : Penerimaan Non Pajak Pendapartan Asli Daerah						
17	Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1 tahun	200.302.000,00	133.068.000,00	66,43%

G. Analisis Efisiensi

Tabel 3.14.
Analisis Efisiensi Terhadap Anggaran dan Indikator Kinerja

NO	URAIAN	IDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		TINGKAT EFISIENSI
				Rp.	%	
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah						
1	Pelayanan Pajak Daerah	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	331.255.000,00	295.613.000,00	89,24 %	35.270.000,00
2	Penerapan Pajak Secara Online	Terlaksananya Penerapan Penerimaan Pajak Daerah Secara Online	449.814.000,00	371.195.800,00	85,52 %	78.618,200,00
Sasaran : Peningkatan Penerimaan Daerah						
3	Koordinasi Penerimaan Daerah	Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan dalam 1 Tahun	529.314.000,00	527.531.000,00	99,66 %	1.783.000,00
4	Penagihan dan Verifikasi PAD	Terlaksananya Penagihan dan Verifikasi Terhadap Tunggakan PAD	642.417.000,00	450.315.000,00	70,10%	192.102.000,00
5	Pendataan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan	Peningkatan Kualitas Data	373.350.000,00	241.180.000,00	64,60%	132.170.000,00
6	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya pemutakhiran dan data	152.340.000,00	120.320.000,00	78,98%	32.020.000,00
7	Observasi dan Verifikasi data objek Pajak BPHTB	Terjaringnya wajib pajak BPHTB	77.250.000,00	31.390.000,00	40,63%	45.860.000,00

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

8	Gerakan Taat Pajak	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah	502.250.000,00	397.260.000,00	79,10%	104.990.000,00
9	Pemeriksaan Pajak Daerah	Mendapatkan Data Transaksi Wajib Pajak Selama Pemeriksaan	190.655.000,00	151.510.000,00	79,47%	39.145.000,00
10	Rekonsiliasi Dana bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	Terlaksananya Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	426.091.000,00	393.066.068,00	92,25%	33.024.932,00
11	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tersedianya Perda dan Perbup dalam pemungutan PAD	83.834.000,00	44.098.783,00	52,60%	39.735.217,00
12	Penilaian Individual PBB	Peningkatan Kualitas Data yang Akurat	106.600.000,00	71.330.000,00	66,91%	35.270.000,00
13	Evaluasi Data BPHTB	Terlaksananya Sinkronisasi Data	51.400.000,00	26.110.000,00	50,80%	25.290.000,00
14	Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah	Pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi pajak daerah	143.280.000,00	114.583.000,00	79,97%	28.697.000,00
15	Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah	Evaluasi dan Keadaan Fisik Lapangan	34.000.000,00	19.160.000,00	56,35%	14.840.000,00
16	Penyampaian SPPT PBB P2 se Kabupaten Bengkalis	Jumlah Penyampaian SPPT PBB yang terdistribusi	667.290.000,00	434.425.500,00	65,10%	232.864.500,00
Sasaran : Penerimaan Non Pajak Pendapatan Asli Daerah						
17	Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	200.302.000,00	133.068.000,00	66,43%	67.234.000,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 yang disusun ini merupakan Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis atas pencapaian penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2020. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam melakukan Evaluasi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat tergambar hasil capaian yang telah ditargetkan dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja suatu instansi pemerintah dan juga sebagai bahan evaluasi guna melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Disamping untuk mengetahui gambaran kinerja, juga dapat menjadi bahan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2020 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja ditahun berikutnya.

A. Kesimpulan

Dari hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis diperoleh kesimpulan:

1. Pencapaian kinerja secara umum sudah mencapai hasil yang ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Permasalahan yang dihadapi selama dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis harus dicarikan solusi yang tepat guna menjawab permasalahan yang ada.
3. Anggaran / Dana sebagai pendukung yang tersedia dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan harus merealisasikan kebijakan yang dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

B. Saran - saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan langkah-langkah korektif dan antisipatif untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2020 yang dapat kami susun sebagai bahan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2020 yang juga merupakan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

Bengkalis, Januari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,



SUPARDI, S.Sos. MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710808 199703 1 006



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

JALAN JENDERAL SUDRIMAN NOMOR 22 BENGKALIS
[WWW. BAPENDA.BENGKALISKAB.GO.ID](http://WWW.BAPENDA.BENGKALISKAB.GO.ID)